

PENGARUH KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Ernawati

erna_wati014@yahoo.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to analyze (a) the influence of local own source revenue performance to the independence level of local finance, (b) the influence of capital expenditure to the independence level of local finance on districts/cities in East Java Province. The research method has been carried out by using quantitative method. The research samples are 35 districts/cities in East Java Province. The data is the secondary data which is in the form of the realization report of local budget of districts/cities in East Java Province in 2012-2015 observation periods. The data has been obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia East Java Province Representative. The data analysis has been done by using multiple linear regressions analysis. The result of the research proves that the performance of local own source revenue has positive influence to the independence level of local finance. Capital expenditure has positive influence to the independence level of local finance of districts/cities in East Java Province.

Keywords: Local own source revenue performance, capital expenditure, the independence level of local finance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (a) Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (b) Pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran dan belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2015. Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Demikian juga dengan belanja modal yang berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan di berbagai bidang seperti sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan sekarang diganti dengan UU Nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah yang juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah. Prinsip dasar dalam pemberian

otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pihak eksternal terutama Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah daripada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pihak eksternal maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat lebih mendominasi susunan APBD. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar bisa menjadi daerah yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat atau pihak eksternal. Oleh karena itu, masing-masing daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan cara lebih menggali sumber daya yang dimiliki daerah. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan.

PAD merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat kinerja PAD tersebut dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan PAD yang dianggarkan. Apabila realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada PAD yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maka dapat dikatakan kinerja PAD dari suatu daerah tersebut semakin efektif.

PAD merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah. Pemerintah Daerah harus mampu mengenali sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan PAD. Apabila struktur PAD sudah kuat, maka daerah tersebut juga memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat sehingga dapat mengurangi adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat. PAD biasanya selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria dalam mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh maka dapat mengurangi ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Selain PAD, kemandirian keuangan daerah juga dapat disebabkan oleh faktor lain, salah satunya yaitu belanja modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pemerintah Daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi dan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Akan tetapi, faktanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran aparatur masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk rakyat misalnya anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil daripada belanja pegawai di antaranya yaitu anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang lebih besar. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Penelitian-penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Muliana (2009) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2011) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Namun kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) dan Simbolon (2011) tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2014) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

Selain penelitian tentang hubungan antara kinerja pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang dinilai dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah di atas, terdapat juga penelitian mengenai hubungan antara belanja modal dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Beberapa penelitian tersebut di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariani dan Putri (2016) bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imawan dan Wahyudin (2014) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda di berbagai wilayah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis tentang pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengambil sampel dari wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisis: (1) pengaruh kinerja pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Stewardship Theory

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory*. *Stewardship theory* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan). Donaldson dan Davis, 1991 (dalam Raharjo, 2007) menyatakan teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. *Stewardship theory* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* (pemilik sumber daya).

Stewardship theory menggambarkan situasi dimana Pemerintah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan publik. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara

kepuasan dan kesuksesan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik (*principal*) akan merasa puas dengan kinerja Pemerintah. Pemerintah yang baik adalah Pemerintah Daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri.

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan Pendapatan asli daerah pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya (Mahmudi, 2010:18).

Keuangan Daerah

Mamesah, 1995 (dalam Halim dan Kusufi, 2012:25) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai: "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku". Menurut Halim dan Kusufi (2012:25), dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut: (1) Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah, (2) Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (Halim dan Kusufi, 2012:28-29).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengurusan keuangan di Pemerintah Daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada Pemerintah Daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam "pengurusan umum"-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada "pengurusan khusus"-nya (Halim dan Kusufi, 2012:21). Mamesah, 1995 (dalam Halim dan Kusufi, 2012:20) menyatakan bahwa APBD

dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim dan Kusufi, 2012:33). Menurut Halim dan Kusufi (2012:22), APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutup biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012:103), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah bersumber dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: (a) Pajak kendaraan bermotor, (b) Pajak kendaraan di air, (c) Bea balik nama kendaraan bermotor, (d) Bea balik nama kendaraan di air, (e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (f) Pajak air permukaan, (g) Pajak rokok. Selanjutnya jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun dari pajak berikut: (a) Pajak hotel, (b) Pajak restoran, (c) Pajak hiburan, (d) Pajak reklame, (e) Pajak penerangan jalan, (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c, (g) Pajak lingkungan, (h) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (i) Pajak parkir, (j) Pajak sarang burung walis, (k) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, (l) BPHTB.

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah: (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (b) Jasa giro, (c) Pendapatan bunga, (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (e) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemandirian daerah yang semakin baik.

Tabel 1
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

| Kemampuan keuangan | Rasio efektivitas (%) |
|--------------------|-----------------------|
| Sangat efektif | >100 |
| Efektif | 100 |
| Cukup efektif | 90-99 |
| Kurang efektif | 75-89 |
| Tidak efektif | <75 |

Sumber: Mahmudi, 2010 (dalam Kartika dan Kusuma, 2015)

Belanja Modal

Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: (1) Belanja tanah, (2) Belanja peralatan dan mesin, (3) Belanja modal gedung dan bangunan, (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (5) Belanja aset tetap lainnya, (6) Belanja aset lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1: belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama

pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 2
Pola hubungan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

| Kemampuan | Rasio (%) | Pola |
|------------------|------------------|--------------|
| Rendah sekali | 0-25 | Instruktif |
| Rendah | >25-50 | Konsultatif |
| Sedang | >50-75 | Partisipatif |
| Tinggi | >75-100 | Delegatif |

Sumber: Mahsun, 2006 (dalam Darwis, 2015)

Adapun pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut: (1) Apabila rasio kemandirian 0%-25%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah sekali. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah sekali sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat (pola hubungan instruktif), (2) Apabila hasil rasio kemandirian >25%-50%, berarti kemampuan daerah tersebut rendah. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah rendah dalam hal keuangan sudah mulai berkurang campur tangan dari Pemerintah sehingga daerah tersebut dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan konsultatif), (3) Apabila hasil rasio kemandirian >50%-75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah sedang dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (pola hubungan partisipatif), (4) Apabila hasil rasio kemandirian >75%-100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi maka campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu melaksanakan otonomi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan pendapatan asli daerahnya sehingga tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sumber pendapatan asli daerah ini dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, kinerja pendapatan asli daerah ini sangat penting untuk ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Semakin efektif pendapatan asli daerah maka daerah tersebut dapat semakin mandiri.

Dalam penelitian yang dilakukan Siagian (2014) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2011) bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Muliana (2009) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik Investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh Pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.

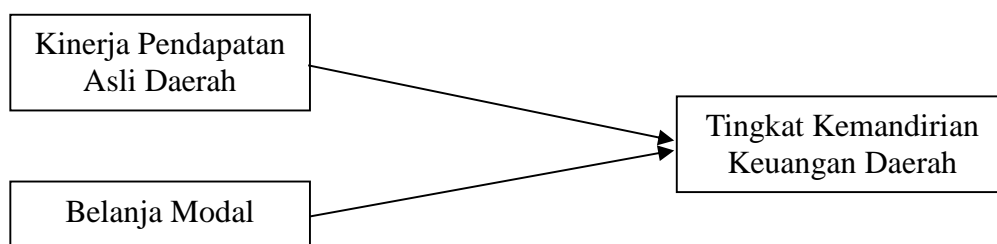
Dalam penelitian yang dilakukan Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Imawan dan Wahyudin (2014) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ariani dan Putri (2016) bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61). Populasi (objek) dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:62). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:68). Adapun pertimbangan yang ditentukan untuk pengambilan sampel ini yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 4 tahun pada periode 2012-2015, (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyajikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lengkap selama 4 tahun (2012-2015)

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi, dan arsip-arsip dari pihak-pihak yang bersangkutan (Sunyoto, 2011:164).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kinerja pendapatan asli daerah, belanja modal, dan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variabel Dependen

Variabel dependen biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dengan menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Halim dan Kusufi (2012), tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Variabel independen biasa disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja pendapatan asli daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau memperoleh pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan atau ditentukan. Kinerja pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui rasio efektivitas. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah merupakan ukuran untuk menilai kinerja pendapatan asli daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2012), rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yg ditetapkan berdasar potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Menurut Simatupang (2016), belanja modal dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja modal yaitu:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

hasil SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| KPAD | 140 | ,874 | 1,385 | 1,13102 | ,095264 |
| BLMO | 140 | ,079 | ,370 | ,18513 | ,045557 |
| TKKD | 140 | ,056 | 1,577 | ,18563 | ,204617 |
| Valid N (listwise) | 140 | | | | |

Sumber: Output SPSS

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada pengujian normalitas dengan menggunakan grafik *normal probability plot* dan uji *kolmogorov smirnov* dapat diketahui bahwa data yang digunakan oleh peneliti tidak berdistribusi normal. Untuk mendapatkan normalitas data maka dalam penelitian ini peneliti melakukan *screening* terhadap data yang dilakukan untuk mendeteksi adanya data *outlier*. Setelah dilakukan *outlier*, grafik *normal probability plot* menunjukkan penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji *kolmogorov smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga memenuhi asumsi normalitas..

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai variabel kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki nilai tolerance dan VIF yang sama yaitu 0,995 dan 1,005, dimana nilai tolerance tersebut lebih dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan sebesar 1,339. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi di dalam model regresi tersebut yaitu dengan menggunakan ketentuan apabila angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot. Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang teratur dan jelas, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | -,096 | ,040 | | -2,382 | ,019 |
| | KPAD | ,148 | ,033 | ,394 | 4,484 | ,000 |
| | BLMO | ,239 | ,063 | ,335 | 3,818 | ,000 |

a. Dependent Variable: TKKD
Sumber: Output SPSS

Dari output SPSS pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
TKKD = -0,096 + 0,148 KPAD + 0,239 BLMO + e

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil uji kelayakan model regresi dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | ,029 | 2 | ,014 | 16,188 | ,000 ^b |
| | Residual | ,086 | 98 | ,001 | | |
| | Total | ,115 | 100 | | | |

a. Dependent Variable: TKKD
b. Predictors: (Constant), BLMO, KPAD
Sumber: Output SPSS

Diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 16,188 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan nilai signifikansi < 0,05, maka model persamaan regresi dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran dengan *Adjusted R Square* karena nilai *Adjusted R Square* dapat naik dan turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,498 ^a | ,248 | ,233 | ,029702 |

a. Predictors: (Constant), BLMO, KPAD

b. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Output SPSS

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,233 yang berarti 23,3% variasi atau perubahan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen KPAD dan BLMO. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 23,3% = 76,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -,096 | ,040 | | -2,382 | ,019 |
| | KPAD | ,148 | ,033 | ,394 | 4,484 | ,000 |
| | BLMO | ,239 | ,063 | ,335 | 3,818 | ,000 |

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Output SPSS

Pada tabel *Coefficients*, nilai *Sig.* dari variabel KPAD sebesar 0,000020 dan variabel BLMO sebesar 0,000236. Dari kedua variabel independen tersebut, keduanya memiliki nilai *Sig.* < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Pendapatan Asli Daerah (KPAD) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Begitu juga dengan variabel Belanja Modal (BLMO) yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).

Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung dari variabel Kinerja Pendapatan Asli Daerah (KPAD) adalah sebesar 4,484 dengan nilai *Sig.* yaitu sebesar 0,000020. Dengan nilai *Sig.* 0,000020 < 0,05 dan arah koefisiennya positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja pendapatan asli daerah secara individu berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi kinerja pendapatan asli daerah yang dicapai oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat pula tingkat kemandirian keuangan dari suatu daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2011) dan Muliana (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur maka Kabupaten/Kota tersebut akan menjadi semakin mandiri. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang terdapat pada tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung dari variabel Belanja Modal (BLMO) adalah sebesar 3,818 dengan nilai *Sig.* yaitu sebesar 0,000236. Dengan nilai *Sig.* $0,000236 < 0,05$ dan arah koefisiennya positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal secara individu berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga dalam penelitian ini H_2 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat kemandirian keuangan dari suatu daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) serta Simatupang (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan semakin besarnya belanja modal yang digunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi akan memberikan sumbangan pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan Kabupaten/Kota tersebut dapat menjadi semakin mandiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2012-2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kinerja Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kinerja pendapatan asli daerah yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah. Apabila Pemerintah Daerah dapat merealisasikan PAD lebih tinggi daripada anggaran yang telah ditentukan maka semakin efektif kinerja PAD tersebut, (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini berarti semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, beberapa saran yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan lebih menggali lagi potensi sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat menaikkan jumlah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat lebih dialokasikan untuk kepentingan publik melalui belanja modal. Belanja modal akan memberikan pemasukan atau pendapatan bagi daerah sehingga pendapatan asli daerah semakin bertambah. Dengan demikian daerah menjadi lebih mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, (2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum dicantumkan dalam penelitian karena pada dasarnya masih ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti jenis-jenis penerimaan daerah lainnya misalnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, (3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, K.R. dan G.A. Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper. Universitas Muhammadiyah Surakarta*: 364-369.
- Darwis, E.T.R. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 1-23.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Imawan, R. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal* 3(2): 147-155.
- Kartika, D. dan I. C. Kusuma. 2015. Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Akunida* 1(2): 23-33.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori *Stewardship* dalam Prespektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2(1): 37-46.
- Siagian, S. N. 2014. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Simatupang, F.F. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Simbolon, B.P.J. 2011. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke 24. Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto, D. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Cetakan Pertama. CAPS. Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- ____ Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.